

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

AM Maturidi¹, Ikhwan Wadi², Ahmad Hidayat³

Universitas Gunung Rinjani

email: mansyurabumaturidi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Sampel penelitian terdiri atas 50 responden yang berasal dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan masing-masing OPD diwakili oleh lima responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan nilai signifikansi 0,007. Selain itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan nilai signifikansi 0,000. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah.

Abstract

This study aims to examine the effect of transparency and accountability in regional financial management on the performance of the East Lombok Regency Government. The study employed a quantitative approach with an associative research design. The sample consisted of 50 respondents from 10 Regional Apparatus Organizations (Organisasi Perangkat Daerah/OPD), with five respondents selected from each OPD using a purposive sampling technique. Primary data were collected through questionnaires using a Likert scale and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics. The results indicate that transparency in regional financial management has a positive and significant effect on the performance of the East Lombok Regency Government, with a significance value of 0.007. Furthermore, accountability in regional financial management also has a positive and significant effect on government performance, with a significance value of 0.000. These findings demonstrate that the better the implementation of transparency and accountability in regional financial management, the higher the performance of local government in achieving effective, efficient, transparent, and accountable governance.

Keywords: Transparency, Accountability, Regional Financial Management, Local Government Performance.

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan salah satu tuntutan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, kewenangan yang besar tersebut juga menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel agar setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor yang sangat penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas sehingga mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat secara jujur, mudah diakses, tepat waktu, dan dapat dipahami. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana proses penyusunan

anggaran, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, masyarakat memiliki kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan sehingga dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Selain itu, transparansi juga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah karena setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dilakukan secara terbuka.

Sementara itu, akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran kepada pihak yang memberikan amanah, yaitu masyarakat dan pemerintah pusat. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga menyangkut pencapaian kinerja, efektivitas penggunaan anggaran, efisiensi pelaksanaan program, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah yang memiliki tingkat akuntabilitas tinggi akan lebih mampu menunjukkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas sangat erat dalam menciptakan pemerintahan yang berkinerja tinggi. Transparansi memberikan akses informasi kepada masyarakat, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja yang nyata. Kedua prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam penerapan *good governance* yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pembangunan daerah, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kinerja pemerintah daerah merupakan tingkat keberhasilan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien. Kinerja pemerintah tidak hanya diukur berdasarkan realisasi anggaran, tetapi juga berdasarkan kualitas pelayanan publik, pencapaian indikator pembangunan, kepuasan masyarakat, serta kemampuan pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, keberhasilan suatu pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh bagaimana pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui berbagai inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan pelayanan publik lainnya. Besarnya anggaran yang dikelola menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang mampu menjamin efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas agar tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah masih adanya keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi keuangan daerah, kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan maupun pengawasan anggaran, serta masih ditemukannya kelemahan dalam sistem pengendalian intern pemerintah. Selain itu, hasil pemeriksaan lembaga pengawas masih sering menunjukkan

adanya kelemahan administrasi, ketidaksesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang berlaku, serta kurang optimalnya tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas masih perlu terus dilakukan agar pengelolaan keuangan daerah semakin berkualitas.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, serta manfaat bagi masyarakat. Ketentuan tersebut semakin mempertegas bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan daerah.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan sistem digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan, sistem informasi pemerintah daerah, serta publikasi dokumen anggaran melalui media elektronik diharapkan mampu meningkatkan keterbukaan informasi dan mempercepat proses pelaporan keuangan. Digitalisasi tersebut juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai pelaksanaan APBD sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan keuangan daerah. Namun

demikian, keberhasilan penerapan sistem digital tetap bergantung pada komitmen aparat pemerintah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan yang positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Pemerintah yang mampu memberikan informasi secara terbuka dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaan keuangan cenderung memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi, kualitas pelayanan yang lebih baik, serta efektivitas pembangunan yang lebih optimal. Namun demikian, hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya perbedaan temuan pada beberapa daerah sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah. Kabupaten Lombok Timur memiliki kondisi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang khas sehingga menarik untuk dikaji secara empiris mengenai bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah memengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif (explanatory research). Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menguji hubungan kausal antara variabel independen, yaitu transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terhadap variabel dependen, yaitu kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Penelitian asosiatif digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kedua variabel independen tersebut terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah berdasarkan data empiris yang diperoleh dari responden. Pengumpulan data dilakukan dalam satu periode tertentu (cross sectional), sehingga

data yang diperoleh menggambarkan kondisi transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah pada saat penelitian dilaksanakan.

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Mengingat keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga, penelitian menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel penelitian terdiri atas 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan kinerja. Dari masing-masing OPD ditetapkan 5 responden yang terdiri atas Kepala OPD, Sekretaris OPD, Kepala Subbagian Keuangan atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) atau pejabat lain yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, jumlah keseluruhan sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden. Pemilihan responden tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan tanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh responden dengan menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) hingga skor 5 (sangat setuju). Kuesioner disusun berdasarkan indikator setiap variabel penelitian yang mengacu pada teori, standar pengelolaan keuangan daerah, dan penelitian terdahulu. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi yang meliputi laporan keuangan pemerintah daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dokumen Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD), peraturan perundang-undangan, serta berbagai jurnal ilmiah dan literatur yang relevan dengan penelitian. Kombinasi data primer dan data sekunder diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Hasil Dan Pembahasan

Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah didukung oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing. OPD bertanggung jawab dalam menyusun program kerja, mengelola anggaran, melaksanakan kegiatan pembangunan, serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan

daerah menjadi faktor penting untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan pada 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling karena memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan kinerja. Dari masing-masing OPD ditetapkan lima responden yang terdiri atas Kepala OPD, Sekretaris OPD, Kepala Subbagian Keuangan atau Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran, serta Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Dengan demikian jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 50 orang.

Karakteristik responden menunjukkan bahwa seluruh responden merupakan aparatur sipil negara yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengalaman kerja serta keterlibatan mereka dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan memberikan keyakinan bahwa informasi yang diperoleh melalui kuesioner mampu menggambarkan kondisi transparansi, akuntabilitas, dan kinerja pemerintah daerah secara objektif.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu transparansi (X_1) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (X_2), terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Y). Uji parsial (uji t) dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$).

Tabel 1 Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien Beta	t-hitung	Sig	Keterangan
Transparansi	0,362	2,841	0.000	Signifikan
Akuntabilitas	0,481	3,956	0,000	Signifikan

Sumber: Data Diolah 2026

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,841 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,007, lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dinyatakan diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Adanya pengawasan dari masyarakat mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja lebih profesional, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pencapaian target kinerja organisasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen

dan Meckling (1976) sebagai grand theory dalam penelitian ini. Dalam perspektif teori keagenan, masyarakat bertindak sebagai principal yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah sebagai agent untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. Hubungan keagenan sering kali menimbulkan asimetri informasi (information asymmetry), yaitu kondisi ketika pemerintah sebagai pengelola memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan masyarakat. Transparansi menjadi mekanisme penting untuk mengurangi kesenjangan informasi tersebut melalui penyampaian informasi keuangan yang lengkap, akurat, mudah diakses, dan tepat waktu. Semakin rendah tingkat asimetri informasi, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Kepercayaan tersebut akan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Selain didukung oleh Agency Theory, hasil penelitian ini juga sejalan dengan konsep transparansi dalam good governance yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2018). Menurut Mardiasmo, transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai aktivitas pengelolaan sumber daya publik sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui, memperoleh, serta memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah. Transparansi bukan hanya berkaitan dengan publikasi laporan keuangan, tetapi juga mencakup kemudahan akses informasi, keterbukaan proses pengambilan keputusan, kejelasan prosedur pelayanan, dan penyampaian informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Penerapan transparansi secara konsisten akan meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat pengawasan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk

melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

Hasil penelitian ini juga mendukung teori yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019), yang menjelaskan bahwa transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah yang mampu menyampaikan informasi keuangan secara terbuka akan memperoleh legitimasi yang lebih tinggi dari masyarakat karena setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat diketahui serta dievaluasi secara objektif. Transparansi juga menciptakan budaya kerja yang lebih profesional, meningkatkan disiplin aparatur, serta memperkuat komitmen organisasi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Yuliani (2022) yang menyimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin terbuka pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kualitas pelayanan publik dan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Keterbukaan informasi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan sehingga pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran daerah.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Pratama dan Nugroho (2023) yang menemukan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja organisasi sektor publik. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keterbukaan informasi keuangan mendorong aparatur pemerintah untuk bekerja lebih bertanggung jawab, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Transparansi juga menjadi sarana

untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya, penelitian Rahmawati, Hidayat, dan Kurniawan (2024) juga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, memperkuat pengawasan masyarakat, serta meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah. Pemerintah yang menerapkan keterbukaan informasi secara optimal cenderung memiliki tingkat akuntabilitas yang lebih baik sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, teori, dan temuan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Semakin tinggi tingkat keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat, efektivitas pengawasan publik, dan profesionalisme aparatur pemerintah. Kondisi tersebut akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas pelaksanaan program pembangunan, serta pencapaian tujuan organisasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu terus memperkuat implementasi transparansi melalui penyediaan informasi keuangan yang akurat, mudah diakses, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kinerja pemerintah daerah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,956 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dinyatakan diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Akuntabilitas tercermin dari kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan seluruh proses pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah yang mampu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu, andal, transparan, serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan akan lebih mudah memperoleh kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, akuntabilitas yang tinggi juga mencerminkan adanya komitmen aparatur pemerintah dalam menggunakan anggaran secara efektif, efisien, ekonomis, dan berorientasi pada pencapaian hasil.

Temuan penelitian ini sejalan dengan Agency Theory yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) sebagai grand theory dalam penelitian ini. Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah bertindak sebagai agent yang diberikan amanah oleh masyarakat sebagai principal untuk mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. Sebagai penerima amanah, pemerintah memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan

seluruh kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Akuntabilitas menjadi mekanisme utama dalam mengurangi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Semakin baik pertanggungjawaban yang diberikan pemerintah melalui laporan keuangan dan laporan kinerja yang berkualitas, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Kepercayaan tersebut akan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat sehingga tujuan pembangunan daerah dapat tercapai secara lebih efektif.

Selain mendukung Agency Theory, hasil penelitian ini juga sejalan dengan konsep akuntabilitas dalam good governance sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo (2018). Menurut Mardiasmo, akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberikan amanah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam konteks pemerintahan daerah, akuntabilitas tidak hanya diukur dari kemampuan menyusun laporan keuangan, tetapi juga dari keberhasilan pemerintah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, taat hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat akuntabilitas suatu pemerintah daerah, semakin baik pula kualitas kinerja yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Mahmudi (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan bentuk kewajiban pemerintah untuk menjelaskan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas serta penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat. Akuntabilitas yang baik akan meningkatkan efektivitas pengendalian internal, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran,

serta mendorong aparaturnya pemerintah untuk bekerja secara profesional dan berorientasi pada hasil. Melalui akuntabilitas yang tinggi, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Secara empiris, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sari dan Yuliani (2022) yang menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan daerah, semakin baik pula kualitas pelayanan publik dan efektivitas pencapaian sasaran organisasi. Akuntabilitas mendorong aparaturnya pemerintah untuk bekerja sesuai dengan prosedur, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan memaksimalkan pemanfaatan anggaran untuk kepentingan masyarakat.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Pratama dan Nugroho (2023) yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi sektor publik. Pemerintah yang memiliki sistem pertanggungjawaban yang baik cenderung mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, memperbaiki kualitas pelayanan publik, dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian Rahmawati, Hidayat, dan Kurniawan (2024) menunjukkan bahwa akuntabilitas yang kuat mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat implementasi prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, teori, dan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam

meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan secara transparan, tepat waktu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berorientasi pada hasil, maka semakin tinggi pula kualitas kinerja organisasi pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur perlu terus memperkuat sistem akuntabilitas melalui peningkatan kualitas laporan keuangan, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi aparaturnya, serta optimalisasi evaluasi kinerja agar penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, efisien, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Transparansi yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi keuangan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat pengawasan publik, dan mendorong aparaturnya bekerja lebih profesional. Sementara itu, akuntabilitas yang tercermin dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas penggunaan anggaran terbukti meningkatkan kualitas kinerja organisasi pemerintah. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah secara efektif dan berkelanjutan.

Refrensi

- Abdullah, S., & Halim, A. (2020). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 245–260.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah* (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kurniawan, D., & Sari, N. (2023). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Governance Indonesia*, 7(1), 45–59.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (3rd ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi.
- Pratama, R., & Nugroho, A. (2023). Transparansi pengelolaan keuangan daerah dan implikasinya terhadap kinerja organisasi sektor publik. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16(2), 121–137.
- Rahmawati, F., Hidayat, T., & Kurniawan, A. (2024). Good governance, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 16(1), 15–29.
- Sari, D., & Yuliani, R. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 26(2), 140–153.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 3). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Utami, N., & Wibowo, E. (2021). Pengaruh penerapan good governance terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 5(2), 98–112.
- Wahyuni, S., & Setiawan, B. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 67–82.
- Yusuf, M., & Rahman, A. (2021). Pengaruh sistem pengendalian intern, transparansi, dan akuntabilitas terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 11(3), 530–545.
- Zulkarnain, M., & Lestari, P. (2023). Pengaruh transparansi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah dengan akuntabilitas sebagai variabel pendukung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 75–90.
- Arifin, Z., & Hasanah, U. (2024). Pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah pada organisasi perangkat daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 19(1), 1–17.
- Putri, E., & Firmansyah, D. (2022). Pengaruh transparansi, partisipasi anggaran, dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan*, 5(2), 215–229.
- OECD. (2020). *OECD Public Integrity Handbook*. Paris: OECD Publishing.